

# STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI ACEH **2023**



Katalog: 7203002.11

ISSN 2714-9889

**STATISTIK KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI ACEH 2023  
Volume 7, 2024**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI ACEH**

# STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI ACEH 2023 Volume 7, 2024

Nomor Publikasi : 11000.24036  
Katalog BPS : 7203002.11  
ISSN : 2714-9889  
Ukuran Buku : 21,0 cm x 29,7 cm  
Jumlah Halaman : x + 50 halaman

**Penyusun Naskah :**  
Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

**Penyunting :**  
Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

**Pembuat Kover :**  
Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

**Penerbit :**  
©Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh.

Katalog: 7203002.11

ISSN 2714-9889

**TIM PENYUSUN**

**STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**PROVINSI ACEH 2023**

**Volume 7, 2024**

**Pengarah**

Ahmadriswan Nasution

**Penanggung Jawab**

Titiek Zurriyati

**Penyunting**

Effendy

**Pengolah Data, Penulis Naskah, dan Penerjemah**

Effendy

**Penata Letak**

Effendy



# KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2022-2023 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh ini merupakan kelanjutan dari publikasi tahun sebelumnya, yaitu Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2022.

Publikasi ini menyajikan data tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Realisasi APBD) Pemerintah Provinsi Aceh tahun 2022 serta data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Aceh tahun 2023. Data-data tersebut dikumpulkan oleh BPS Provinsi Aceh dan BPS Kabupaten/Kota di Aceh dalam kegiatan Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya publikasi ini. Kritik dan saran yang konstruktif dari pengguna sangat diharapkan guna penyempurnaan publikasi di masa mendatang.

Banda Aceh, Juli 2024  
Kepala BPS Provinsi Aceh



**AHMADRISWAN NASUTION**

## ABSTRAKSI

Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Aceh selama 2 tahun terakhir mengalami penurunan, yaitu sebesar 16,77 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 11,20 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal ini masih terkait penghematan anggaran akibat Pandemi Covid-19. Pendapatan keuangan Pemerintah Provinsi Aceh sebagian besar berasal dari pos Pendapatan Transfer dengan kontribusi sebesar 64 – 66 persen per tahun yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat. Adapun Pendapatan Asli Daerah sebagai bentuk kemandirian keuangan daerah kecil jumlahnya, hanya sekitar 15-25 persen. Akan tetapi, realisasi belanja Pemerintah Provinsi Aceh tetap meningkat. Sepanjang tahun 2022-2023 pengeluaran Pemerintah Provinsi Aceh mencapai 11,20 hingga 16,77 triliun rupiah. Belanja Pemerintah Provinsi Aceh ini dialokasikan terbanyak kepada belanja operasi dengan kontribusi sebesar 56 – 67 persen.

Realisasi Pendapatan Pemerintah kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh pada tahun 2022 mencapai 28,63 triliun triliun rupiah. Pada tahun 2023, target pendapatan Pemerintah kabupaten/kota seluruh Provinsi Aceh menurun menjadi 27,88 triliun rupiah. Adapun total belanja daerah tingkat dua selama tahun 2022 mencapai 28,63 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2023 kabupaten/kota menargetkan belanja daerah sebesar 27,88 triliun rupiah. Pendapatan Pemerintah kabupaten/kota sebagian besar berasal dari Pendapatan Transfer, dengan kontribusi sebesar 86 persen per tahun. Pendapatan dari PAD sebagai bentuk kemandirian daerah sangat kecil jumlahnya (10 persen). Sedangkan belanja Pemerintah kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh dialokasikan terbanyak kepada belanja operasi dengan kontribusi sebesar 63 - 67 persen setiap tahunnya.

Secara total, pendapatan daerah Aceh yang bersumber dari dana Pemerintah Provinsi Aceh dan kabupaten/kota seluruh Provinsi Aceh pada tahun 2022 berjumlah 45,40 triliun rupiah dengan realisasi belanja berjumlah 42,29 triliun rupiah. Sedangkan pendapatan dan belanja pada tahun 2023 diperkirakan masing-masing mencapai 39,07 triliun rupiah.

# DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAKSI	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
<b>I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
I.1 LATAR BELAKANG	1
I.2 TUJUAN	2
<b>II METODOLOGI</b>	<b>3</b>
<b>III KONSEP DAN DEFINISI</b>	<b>5</b>
<b>IV ULASAN RINGKAS</b>	<b>11</b>
4.1 REALISASI APBA	12
4.1.1 PENDAPATAN DAERAH	12
4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14
4.1.1.2 Pendapatan Transfer	16
4.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	16
4.1.2 BELANJA DAERAH	17
4.1.2.1 Belanja Operasi	18
4.1.2.2 Belanja Modal	19
4.1.2.3 Belanja Tidak Terduga	19
4.1.2.4 Belanja Transfer	20
4.2 REALISASI TOTAL APBD KABUPATEN/KOTA	22
4.2.1 PENDAPATAN DAERAH	22
4.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	23
4.2.1.2 Pendapatan Transfer	24
4.2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	25
4.2.2 BELANJA DAERAH	27
4.3 APBA DAN TOTAL APBD	30
4.3.1 Pendapatan Daerah	30
4.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	31
4.3.1.2 Pendapatan Transfer	33
4.3.2 Belanja Daerah	35
4.3.2.1 Belanja Operasi	35
4.3.2.2 Belanja Modal	36
4.3.2.3 Belanja Transfer	37
<b>LAMPIRAN</b>	<b>47</b>

## DAFTAR TABEL

		<b>Judul Tabel</b>	<b>Hal</b>
Tabel	4.1	Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Aceh Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2022 – 2023 (Miliar Rupiah)	13
Tabel	4.2	Kontribusi Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Aceh Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2022-2023 (Persen)	15
Tabel	4.3	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Aceh menurut Jenis Pendapatan Tahun 2022-2023 (Persen)	17
Tabel	4.4	Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Aceh menurut Jenis Belanja Tahun 2022-2023 (Miliar Rupiah)	19
Tabel	4.5	Kontribusi Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Aceh menurut Jenis Belanja Tahun 2022-2023 (Persen)	21
Tabel	4.6	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh Menurut Jenis Belanja Tahun 2022-2023 (Miliar Rupiah)	23
Tabel	4.7	Kontribusi Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2022-2023 (Persen)	25
Tabel	4.8	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh menurut Jenis Pendapatan Tahun 2022-2023 (Persen)	27
Tabel	4.9	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh Menurut Jenis Belanja Tahun 2022-2023 (Miliar Rupiah)	28
Tabel	4.10	Kontribusi Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh Menurut Jenis Belanja Tahun 2022-2023 (Persen)	29
Tabel	4.11	Pertumbuhan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh Menurut Jenis Belanja Tahun 2022-2023 (Persen)	30
Tabel	4.12	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Aceh Tahun 2022-2023 (Miliar Rupiah)	31

# DAFTAR GAMBAR

		<b>Judul Gambar</b>	<b>Hal</b>
Gambar	4.1	Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2022-2023 (Triliun rupiah)	13
Gambar	4.2	Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Aceh menurut Jenis Belanja Tahun 2022-2023 (Triliun Rupiah)	20
Gambar	4.3	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/kota Seluruh Provinsi Aceh Tahun 2022-2023 (Triliun Rupiah)	25
Gambar	4.4	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh Tahun 2022-2023 (Triliun Rupiah)	28
Gambar	4.5	Realisasi PAD Pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh Tahun 2022-2023 (Miliar Rupiah)	32
Gambar	4.6	Kontribusi Realisasi PAD Pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten/ Kota seluruh Provinsi Aceh Tahun 2022-2023 (Persen)	32
Gambar	4.7	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Aceh Tahun 2022-2023 (Triliun Rupiah)	34
Gambar	4.8	Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Aceh Tahun 2022-2023 (Triliun Rupiah)	36
Gambar	4.9	Realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Aceh Tahun 2022-2023 (Triliun Rupiah)	37
Gambar	4.10	Realisasi Belanja Transfer Pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Aceh Tahun 2022-2023 (Triliun Rupiah)	38

# DAFTAR LAMPIRAN

		<b>Judul Lampiran</b>	<b>Hal</b>
Lampiran	1	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Aceh (APBA) Tahun 2022-2023 (Miliar Rupiah)	42
Lampiran	2	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh Tahun 2022-2023 (Miliar Rupiah)	43
Lampiran	3	Kontribusi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Aceh (APBA) Tahun 2022 – 2023 (Persen)	44
Lampiran	4	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kota Seluruh Provinsi Aceh Tahun 2022 – 2023 (Persen)	45
Lampiran	5	Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Aceh (APBA) Tahun 2022– 2023 (Persen)	46
Lampiran	6	Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kota Seluruh Provinsi Aceh Tahun 2022-2023 (Persen)	47
Lampiran	7	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Aceh (APBA) dan Total Kabupaten/Kota (APBD) Tahun 2022– 2023 (Miliar Rupiah)	48
Lampiran	8	Kontribusi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Aceh (APBA) dan Total Kabupaten/Kota (APBD) Tahun 2022– 2023 (Persen)	49
Lampiran	9	Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Aceh (APBA) dan Total Kabupaten/Kota (APBD) Tahun 2022– 2023 (Persen)	50



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merubah sistem pemerintahan daerah yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi desentralistik dan mendekatkan pelayanan masyarakat menjadi pelayanan lokal. Prinsip otonomi seluas-luasnya membuat manajemen kepegawaian dan keuangan yang dahulu diatur dengan ketat oleh Pusat didelegasikan secara penuh kepada Daerah.

Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan harus dilaksanakan secara terpadu dan terus ditingkatkan. Salah satu upaya perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan adalah dalam bidang keuangan daerah melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Desentralisasi pemerintahan akhirnya banyak melahirkan daerah baru. Berkembangnya jumlah pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah pusat, DPR/DPRD maupun masyarakat. Salah satunya, ingin diketahui aktivitas pemerintahan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayahnya, terutama bagi pemerintahan daerah yang baru. Penyelenggaraan aktivitas tersebut tentunya terkait erat dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain, bagaimana suatu pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada, meningkatkan pendapatan daerahnya, dan mengalokasikannya untuk kesejahteraan masyarakat.

Dengan melihat potensi suatu daerah dari sisi pendapatan dan pengeluaran, maka dapat disusun kebijakan yang tepat, baik oleh pemerintah daerah itu sendiri,

pemerintah pusat, maupun para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka aktivitas pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, dalam pembuatan kebijakan tentu diperlukan data yang dapat menggambarkan seluruh potensi provinsi/kabupaten/kota agar kebijakan yang dibuat lebih terarah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka disusunlah Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh.

## 1.2 Tujuan

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh ini menyajikan data tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Aceh tahun anggaran 2021 dan Anggaran Pemerintah Provinsi Aceh tahun anggaran 2022.

Beberapa indikator/informasi penting yang dimuat dalam publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah ini, antara lain:

- Informasi tentang realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Provinsi Aceh.
- Informasi tentang potensi dan peranan sumber dana dari Pemerintah Provinsi
- Informasi untuk menentukan jenis dan besaran bantuan bagi Provinsi, baik Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU).





## BAB II METODOLOGI

Data Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Aceh merupakan data sekunder yang bersumber dari Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPB), Kementerian Keuangan.

Data realisasi pendapatan dan belanja pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang sebelumnya bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah provinsi/kabupaten/kota di seluruh Aceh melalui Survei Keuangan Pemerintah Daerah dengan menggunakan kuesioner K-1 untuk Pemerintahan Provinsi dan kuesioner K-2 untuk Pemerintahan Kabupaten/Kota di seluruh Aceh serta data anggaran yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner APBD-1 untuk Pemerintahan Provinsi dan kuesioner APBD-2 untuk Pemerintahan Kabupaten/Kota. Selama tahun 2022 kegiatan pengumpulan data Survei Statistik keuangan Pemerintah Daerah tidak terlaksana karena adanya penghematan anggaran oleh Pemerintah Pusat sehingga data yang digunakan berupa data sekunder.

<https://aceh.bps.go.id>



# BAB III KONSEP DAN DEFINISI

**Pendapatan Asli Daerah (PAD)** adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya.

PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

**Pajak Daerah** adalah kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah antara lain: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.

**Retribusi Daerah** adalah pendapatan atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dana tau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

**Hasil Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** adalah pendapatan yang berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMN dan BUMD.

**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah** adalah pendapatan asli daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

**Pendapatan Transfer** adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan.

Pendapatan Transfer terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat** adalah pendapatan yang mencakup Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan.

**Pendapatan Transfer Antar Daerah** adalah pendapatan yang mencakup Bantuan Keuangan Umum dan Khusus baik dari Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan/atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencakup pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.

**Belanja Daerah** terdiri atas :

1. Belanja Operasi
2. Belanja Modal
3. Belanja Tidak Terduga; dan
4. Belanja Transfer

**Belanja Operasi** adalah pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

**Belanja Pegawai** adalah kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN.

**Belanja Barang dan Jasa** adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dana tau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.

Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.

**Belanja Bunga** adalah belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

**Belanja Subsidi** adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

**Belanja Hibah** adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Belanja Bantuan Sosial** adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga. Kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

**Belanja Modal** adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Pembentukan aset tersebut secara rinci meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, meubelair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/ keamanan.

**Belanja Tidak Terduga** adalah pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

**Bantuan Transfer** adalah pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

**Belanja Bagi Hasil** adalah pengeluaran uang yang mencakup pengeluaran bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.

**Belanja Bantuan Keuangan** adalah pengeluaran berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

**Pembiayaan Daerah** adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

**Penerimaan Pembiayaan Daerah** terdiri atas :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman;
- f. Penerimaan piutang daerah; dan
- g. Penerimaan kembali investasi dana bergulir.

**Pengeluaran Pembiayaan Daerah** terdiri atas :

- a. Pembentukan dana cadangan;
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- c. Pembayaran pokok utang; dan
- d. Pemberian pinjaman daerah.



## BAB IV ULASAN RINGKAS

Pembangunan daerah pada hakikatnya adalah upaya terencana untuk menghasilkan kapasitas pemerintahan yang memiliki kemampuan yang handal dan profesional. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, pembangunan yang dilakukan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus dilaksanakan secara terpadu, efektif, dan efisien agar tercapai kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh wilayah.

Kemandirian keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi daerah terutama terkait dengan kontribusi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Besarnya kontribusi pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah merupakan sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong perekonomian daerah. Pemerintah daerah dituntut menjadi motor utama dalam menggerakkan perekonomian daerahnya masing-masing agar dapat terus tumbuh dari tahun ke tahun.

Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya merupakan gambaran langkah kongkret pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Kebijakan tersebut harus mencerminkan langkah pemerintah daerah dalam perbaikan mutu pelayanan kepada masyarakat.

## **4.1 REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI ACEH (APBA)**

Pemerintah Provinsi Aceh menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh (APBA) sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah. APBA memuat secara rinci program-program yang akan dilaksanakan sekaligus sumber pembiayaannya. Penyusunan anggaran tersebut harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.

### **4.1.1 Pendapatan Daerah**

Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh selama dua tahun terakhir berjumlah 16,77 dan 11,19 triliun rupiah. Tanpa penerimaan pembiayaan daerah, realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Aceh menurun selama dua tahun terakhir dari 13,35 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 10,19 triliun rupiah pada tahun 2023. Penurunan yang terjadi sejak tahun 2020 disebabkan penghematan anggaran dan berubahnya pola/sistem kerja yang mulai diterapkan sejak Pandemi Covid-19.

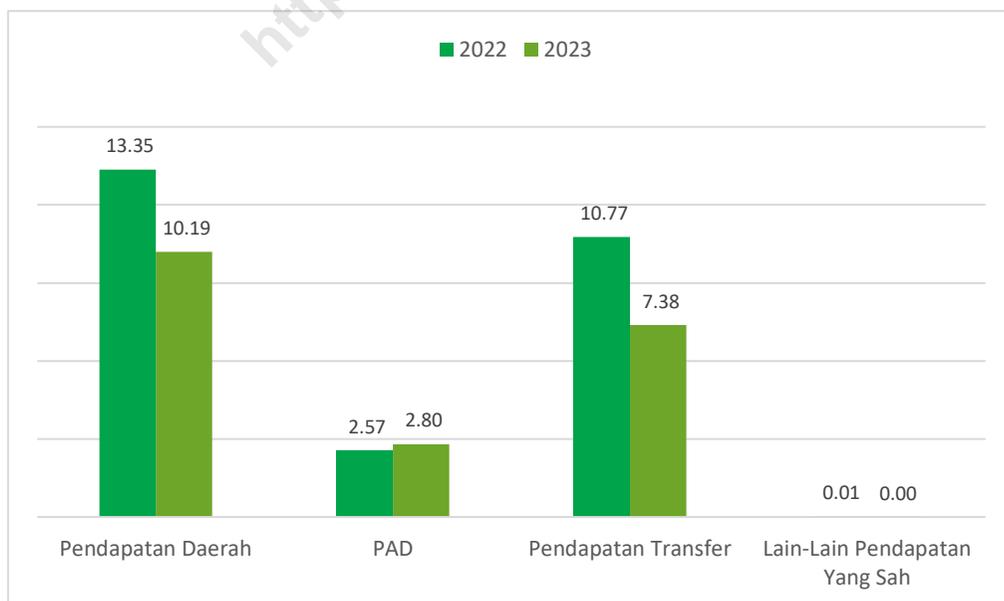


Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Aceh Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2022-2023 (Miliar rupiah)

Jenis Belanja		2022	2023*
(1)		(2)	(3)
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH (1 +2 +3)</b>	<b>13.352,98</b>	<b>10.186,82</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>2.568,19</b>	<b>2.805,48</b>
1.1	Pajak Daerah	1.540,10	1.720,37
1.2	Retribusi Daerah	9,07	12,94
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	182,39	252,93
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	836,64	819,24
<b>2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>10.773,39</b>	<b>7.377,78</b>
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	10.773,39	7.377,78
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>11,40</b>	<b>3,56</b>
3.1	Pendapatan Hibah	11,40	3,56
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>3.413,17</b>	<b>1.007,04</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>16.766,15</b>	<b>11.193,86</b>

\*) APBA

Gambar 4.1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2022-2023 (Triliun rupiah)



\*) APBA

#### 4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah diupayakan semaksimal mungkin bersumber dari kemampuan keuangan daerah sendiri untuk memacu peningkatan kemandirian daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak untuk diperhatikan.

PAD merupakan hal penting dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat, dalam hal ini transfer dana ke daerah semakin kecil. Tingkat kemandirian keuangan daerah terbagi menjadi:

1. Rendah Sekali, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai 0-25 persen. Sehingga pemerintah pusat memiliki peranan yang dominan daripada pemerintah daerah itu sendiri.
2. Rendah, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai di atas 25 hingga 50 persen. Dengan kata lain, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Sedang, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai di atas 50 hingga 75 persen. Artinya, daerah dianggap sudah mendekati mampu untuk melaksanakan otonomi daerah.
4. Tinggi, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai di atas 75 persen. Bisa diartikan bahwa pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya.

Tabel 4.2 Kontribusi Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Aceh Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2022-2023 (Persen)

Jenis Belanja		2022	2023*
(1)		(2)	(3)
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH (1 +2 +3)</b>	<b>79,64</b>	<b>91,00</b>
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	15,32	25,02
1.1	Pajak Daerah	9,19	15,37
1.2	Retribusi Daerah	0,05	0,12
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,09	2,26
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4,99	7,32
2	PENDAPATAN TRANSFER	64,26	65,91
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	64,26	65,91
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,07	0,03
3.1	Pendapatan Hibah	0,07	0,03
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undadngan	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>20,36</b>	<b>9,00</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\*) APBA

Walaupun realisasi PAD Pemerintah Provinsi Aceh sejak adanya pandemi Covid-19 menurunkan daya beli masyarakat sehingga menurunkan produksi, hal ini tidak membuat PAD Aceh dengan sumber utama pajak dan retribusi menjadi menurun. Realisasi PAD Pemerintah Provinsi Aceh mengalami peningkatan dari 2,57 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 2,80 triliun rupiah pada tahun 2023. Namun angka tersebut tergolong rendah, dikarenakan kontribusi PAD terhadap APBA masih di kisaran 25 – 50 persen. Artinya, Pemerintah Provinsi Aceh masih sangat bergantung pada anggaran dari pemerintah pusat. Kedepannya, diharapkan pemerintah Aceh mengerahkan segala sumber daya yang ada dan melakukan strategi pembangunan yang tepat agar kemandirian daerah perlahan dapat terwujud. Penyumbang terbesar dalam PAD berasal dari pajak daerah, yaitu 1,72 triliun rupiah dalam tahun terakhir dengan proporsi sekitar 15 persen .

#### 4.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Celah fiskal daerah merupakan selisih antara kebutuhan fiskal daerah dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga untuk menutupi kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah perlu adanya tambahan pendapatan berupa transfer ke daerah. Pendapatan transfer berasal dari pemerintah pusat dalam APBN dan berasal dari APBD antar daerah. Jenis pendapatan transfer terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.

Pendapatan Transfer memegang peranan yang penting bagi Pemerintahan Provinsi Aceh, dikarenakan kontribusinya yang cukup tinggi. Realisasi Pendapatan Transfer selama tahun 2022-2023 menurun dari 10,77 triliun rupiah menjadi 7,38 triliun rupiah. Walaupun secara persentase kontribusi pendapatan transfer meningkat dari 64,26 persen menjadi 65,91 persen selama dua tahun terakhir.

Berdasarkan realisasi APBA tahun 2022-2023, terlihat bahwa kontribusi pada pendapatan transfer ini seluruhnya berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat, yaitu sekitar 64,26 persen di tahun 2022 dan 65,91 persen di tahun 2023. Tidak ada yang berasal dari pendapatan transfer antar daerah selama dua tahun terakhir. Sumber pendapatan lainnya diperoleh dari dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus mulai mengalami penurunan sejak tahun 2020, dan akan menurun mencapai 1 persen dari Dana Alokasi Umum mulai tahun 2023 dan akan berakhir pada tahun 2027 sesuai ketentuan yang berlaku. Di Aceh sendiri, peruntukan dana otonomi khusus ini dibelanjakan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan syariat islam.

#### 4.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan sumber penerimaan pendapatan Pemerintah Provinsi Aceh yang memberikan kontribusi paling kecil. Selama periode 2022-2023, pendapatan dari pos ini mengalami penurunan dari 11,40 miliar rupiah menjadi 3,56 miliar rupiah, dengan kontribusi hanya 0,07 persen ditahun 2022 dan meningkat menjadi 0,03 persen pada tahun 2023.

Tabel 4.3 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Aceh menurut Jenis Pendapatan Tahun 2022-2023 (Persen)

Jenis Belanja		2022	2023*
(1)		(2)	(3)
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH (1 +2 +3)</b>	<b>-4,27</b>	<b>-23,71</b>
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,49	9,24
1.1	Pajak Daerah	0,69	11,71
1.2	Retribusi Daerah	9,21	42,64
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19,65	38,68
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2,59	-2,08
2	PENDAPATAN TRANSFER	-5,75	-31,52
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-5,75	-31,52
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,59	-68,77
3.1	Pendapatan Hibah	16,13	-68,77
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-100,00	0,00
<b>B</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>-14,03</b>	<b>-70,50</b>
JUMLAH		-6,43	-33,24

\*) APBA

#### **4.1.2 Belanja Daerah**

Realisasi total belanja pemerintah Provinsi Aceh sepanjang tahun 2023 mencapai 11,19 triliun rupiah. Dikarenakan tahun berjalan, maka APBA tahun 2023 hanya berupa target bukan merupakan realisasi.

Struktur belanja daerah pemerintah Provinsi Aceh terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

##### **4.1.2.1 Belanja Operasi**

Belanja Operasi menjadi komponen dengan kontribusi yang paling besar baik pada tahun 2022 maupun yang dianggarkan untuk tahun 2023. Realisasi belanja operasi pada tahun 2022 adalah sebesar 9,45 triliun rupiah dengan kontribusi sebesar 56,36 persen terhadap total realisasi belanja pemerintah Provinsi Aceh. Selanjutnya belanja operasi dianggarkan sebesar 7,48 triliun rupiah di tahun 2023 yang kontribusinya hanya 66,79 persen. Komponen belanja operasi yang paling dominan adalah belanja barang dan jasa diikuti dengan belanja pegawai baik pada realisasi belanja tahun 2022 maupun anggaran belanja tahun 2023.

Kontribusi belanja barang dan jasa terhadap total belanja pemerintah Provinsi Aceh yaitu 32,00 persen atau sebesar 5,37 triliun rupiah pada realisasi tahun 2022 dan senilai 30,59 persen atau 3,42 triliun rupiah pada anggaran tahun 2023. Komponen belanja operasi yang memiliki kontribusi terbesar kedua pada tahun 2022-2023 adalah belanja pegawai. Nilai realisasi belanja pegawai pada tahun 2022 adalah sebesar 3,04 triliun rupiah dengan kontribusi terhadap total belanja daerah sebesar 18,16 persen. Kontribusi belanja pegawai dianggarkan sebesar 27,78 persen pada tahun 2023 atau senilai 3,11 triliun rupiah.

Tabel 4.4 Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Aceh menurut Jenis Belanja Tahun 2022-2023 (Miliar Rupiah)

Jenis Belanja		2022	2023*
(1)		(2)	(3)
<b>A</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>16.170,65</b>	<b>11.093,86</b>
1	BELANJA OPERASI	9.449,54	7.476,81
1.1	Belanja Pegawai	3.043,95	3.110,20
1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.365,57	3.424,10
1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00
1.4	Belanja Subsidi	4,47	15,04
1.5	Belanja Hibah	893,22	682,17
1.6	Belanja Bantuan Sosial	142,34	245,29
2	BELANJA MODAL	3.042,32	1.736,33
2.1	Belanja Modal	3.042,32	1.736,33
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	448,85	67,44
3.1	Belanja Tidak Terduga	448,85	67,44
4	BELANJA TRANSFER	3.229,94	1.813,28
4.1	Belanja Bagi Hasil	733,19	862,50
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	2.496,75	950,78
<b>B</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>595,50</b>	<b>100,00</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>16.766,15</b>	<b>11.193,86</b>

\*) APBA



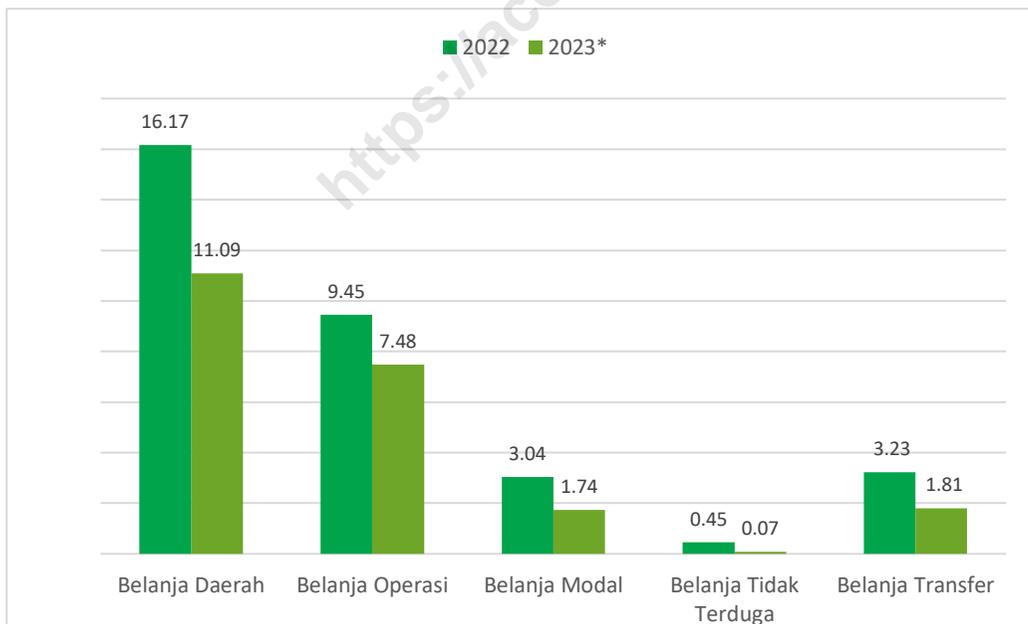
#### 4.1.2.2 Belanja Modal

Selama tahun 2022-2023 kontribusi belanja modal terhadap total belanja Pemerintah Aceh hanya mencapai 15 – 18 persen, berada jauh dibawah kontribusi belanja operasi. Padahal belanja modal merupakan realisasi anggaran yang berakibat bertambahnya asset bagi pemerintah Provinsi Aceh seperti jalan, gedung, irigasi dan sebagainya. Realisasi belanja modal tahun 2022 sebesar 3,04 triliun rupiah dan dianggarkan turun menjadi 1,74 triliun rupiah pada tahun 2023. Kedepannya agar dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Aceh diharapkan lebih fokus pada belanja modal.

#### 4.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Realisasi belanja tidak terduga pada tahun 2022 senilai 448,85 miliar rupiah dan dianggarkan sebesar 67,44 miliar rupiah dengan kontribusi 0,60 persen terhadap total belanja Pemerintah Aceh di tahun 2023.

Gambar 4.2 Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Aceh Menurut Jenis Belanja Tahun 2022-2023 (Triliun Rupiah)



\*) APBA

#### **4.1.2.4 Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan komponen yang memiliki kontribusi terbesar kedua terhadap total belanja Pemerintah Provinsi Aceh baik pada realisasi tahun 2022 maupun anggaran tahun 2023. Nilai kontribusi belanja transfer ini pada tahun 2022 adalah sebesar 19,26 persen persen atau senilai 3,23 triliun rupiah. Sedangkan tahun 2023, kontribusi belanja transfer dianggarkan sebesar 16,20 persen atau senilai 1,81 triliun rupiah.

<https://aceh.bps.go.id>

Tabel 4.5 Kontribusi Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Aceh  
Menurut Jenis Belanja Tahun 2022-2023 (Persen)

Jenis Belanja		2022	2023*
(1)		(2)	(3)
<b>A</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>96,45</b>	<b>99,11</b>
1	BELANJA OPERASI	56,36	66,79
1.1	Belanja Pegawai	18,16	27,78
1.2	Belanja Barang dan Jasa	32,00	30,59
1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00
1.4	Belanja Subsidi	0,03	0,13
1.5	Belanja Hibah	5,33	6,09
1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,85	2,19
2	BELANJA MODAL	18,15	15,51
2.1	Belanja Modal	18,15	15,51
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2,68	0,60
3.1	Belanja Tidak Terduga	2,68	0,60
4	BELANJA TRANSFER	19,26	16,20
4.1	Belanja Bagi Hasil	4,37	7,71
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	14,89	8,49
<b>B</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>3,55</b>	<b>0,89</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\*) APBA



## **4.2 REALISASI TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN/KOTA**

Selain dana pemerintah provinsi, sebagai bagian dari pemberlakuan desentralisasi kewenangan fiskal, terdapat juga anggaran keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diperuntukkan untuk menjalankan roda pemerintahan daerah. Sama seperti anggaran keuangan Pemerintah Provinsi, keuangan kabupaten/kota ini juga terbagi menjadi pos pendapatan dan pos belanja daerah.

### **4.2.1 Pendapatan Daerah**

Berbagai cara dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya pemenuhan pembiayaan pelayanan publiknya. Pertama, Pemerintah Kabupaten/Kota memperoleh dana dari sumber-sumber yang dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua, memperoleh transfer dana dari APBN yang dialokasikan dalam bentuk pendapatan transfer yang mencakup Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan. Ketiga, daerah memperoleh penerimaan dari sumber lainnya seperti bantuan dana kontinjensi dan bantuan dana darurat. Keempat, menerima pinjaman dari dalam dan luar negeri.

Pada tabel 4.7 terlihat bahwa realisasi pendapatan kabupaten/kota seluruh Aceh setiap tahunnya sangat besar, yaitu mencapai 28,63 triliun rupiah pada tahun 2022. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten/Kota menargetkan pendapatan daerah mencapai 27,88 triliun rupiah.

Tabel 4.6 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh Menurut Jenis Belanja Tahun 2022-2023 (Miliar Rupiah)

Jenis Belanja		2022	2023*
(1)		(2)	(3)
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH (1 +2 +3)</b>	<b>27.814,04</b>	<b>27.206,88</b>
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.989,84	2.676,18
1.1	Pajak Daerah	531,45	546,72
1.2	Retribusi Daerah	314,41	267,69
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	116,57	113,20
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.027,41	1.748,58
2	PENDAPATAN TRANSFER	24.657,90	24.083,24
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	21.791,95	22.432,60
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	2.865,95	1.650,64
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	166,30	447,45
3.1	Pendapatan Hibah	17,53	32,68
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undadngan	148,77	414,78
<b>B</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>820,07</b>	<b>673,48</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>28.634,11</b>	<b>27.880,36</b>

\*) APBD

#### 4.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan yang harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan perbaikan fasilitas umum. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan daerahnya sehingga tidak selalu tergantung kepada bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan persentase PAD terhadap total pendapatan daerah, tingkat kemandirian keuangan suatu daerah dapat digolongkan menjadi rendah sekali (0-25%), rendah (>25-50%), sedang (>50-75%) dan tinggi (diatas 75%).

Pada tabel 4.8 tergambar bahwa tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh tergolong rendah sekali dengan persentase PAD sebesar 9-10 persen setiap tahunnya atau senilai 2,69 hingga 2,99 triliun rupiah selama dua tahun terakhir. Pemerintah daerah harus berupaya secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan daerah ini. Hal ini dimaksudkan agar roda pemerintahan kabupaten/kota tidak terganggu apabila suatu saat dana perimbangan sudah tidak diberlakukan lagi.

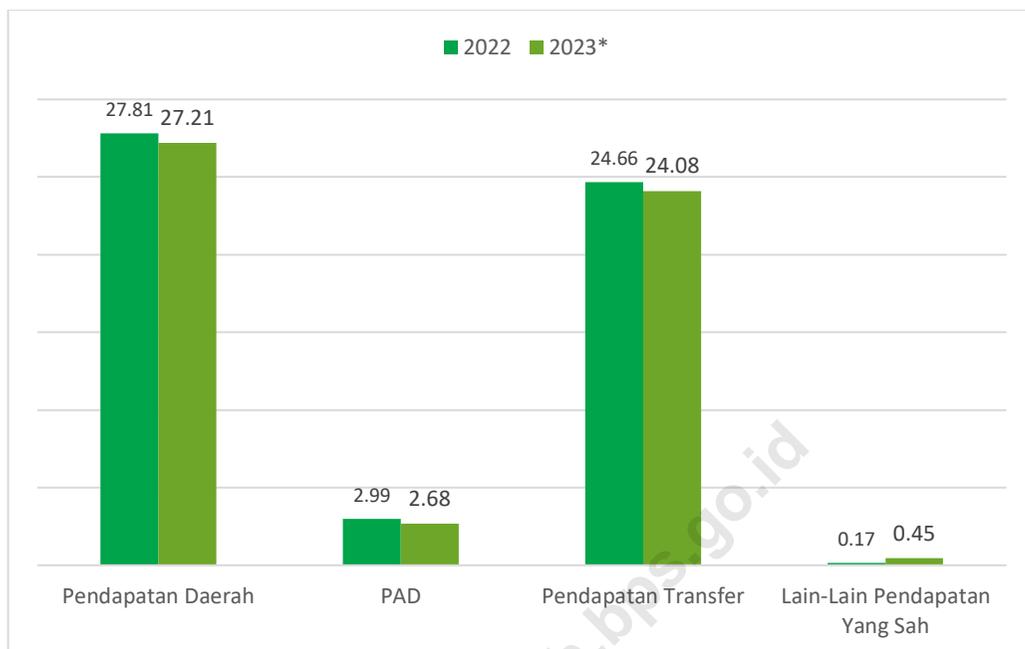
Salah satu langkah yang bisa ditempuh pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan dalam investasi bagi pihak swasta sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Beberapa faktor yang menyebabkan kecilnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya sumber pendapatan potensial yang dapat digali oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, tetapi berada diluar wewenang Pemerintah Daerah tersebut;
2. BUMD pada umumnya belum beroperasi secara efisien. Hal ini tercermin dari laba bersih yang dihasilkan;
3. Rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat, tercermin dari pendapatan perkapita; dan
4. Kurang mampunya Pemerintah Daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan alternatif.

#### **4.2.1.2 Pendapatan Transfer**

Sumber keuangan utama Pemerintah Kabupaten/Kota berasal dari Pendapatan Transfer. Selama tahun 2023, total Pendapatan Transfer yang diterima oleh kabupaten/kota seluruh Aceh berjumlah 24,08 triliun rupiah, atau sebesar 86,58 persen setiap tahunnya.

Gambar 4.3 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh Tahun 2022-2023 (Triliun Rupiah)



\*) APBD

#### 4.2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber pendapatan kabupaten/kota seluruh Provinsi Aceh lainnya adalah dana lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dengan dana penyesuaian dan dana otonomi khusus sebagai bagian pentingnya. Dana ini sebesar 100 - 450 miliar rupiah dengan kontribusi sebesar 1-2 persen pada tahun 2022-2023.

Tabel 4.7 Kontribusi Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2022-2023 (Persen)

Jenis Belanja		2022	2023*
(1)		(2)	(3)
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH (1 +2 +3)</b>	<b>97,14</b>	<b>97,58</b>
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	10,44	9,60
1.1	Pajak Daerah	1,86	1,96
1.2	Retribusi Daerah	1,10	0,96
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,41	0,41
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7,08	6,27
2	PENDAPATAN TRANSFER	86,11	86,38
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	76,10	80,46
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	10,01	5,92
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,58	1,61
3.1	Pendapatan Hibah	0,06	0,12
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undadngan	0,52	1,49
<b>B</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>2,86</b>	<b>2,42</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\*) APBD

Tabel 4.8 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2022-2023 (Persen)

Jenis Belanja		2022	2023*
(1)		(2)	(3)
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH (1 +2 +3)</b>	<b>-2,22</b>	<b>-2,18</b>
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	11,33	-10,49
1.1	Pajak Daerah	10,11	2,87
1.2	Retribusi Daerah	19,03	-14,86
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20,38	-2,89
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10,07	-13,75
2	PENDAPATAN TRANSFER	-1,52	-2,33
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-4,27	2,94
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25,96	-42,41
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-76,92	176,06
3.1	Pendapatan Hibah	-86,02	86,46
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undadngan	-75,00	178,80
<b>B</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>-33,86</b>	<b>-25,79</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>-3,54</b>	<b>-2,86</b>

\*) APBD

#### 4.2.2 Belanja Daerah

Belanja daerah kabupaten/kota seluruh Provinsi Aceh sangat penting untuk dipantau. Total Belanja Daerah seluruh tingkat dua di Provinsi Aceh tahun 2022 berjumlah 28,63 triliun rupiah dan ditargetkan menjadi 27,82 triliun rupiah pada tahun 2023 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.10.

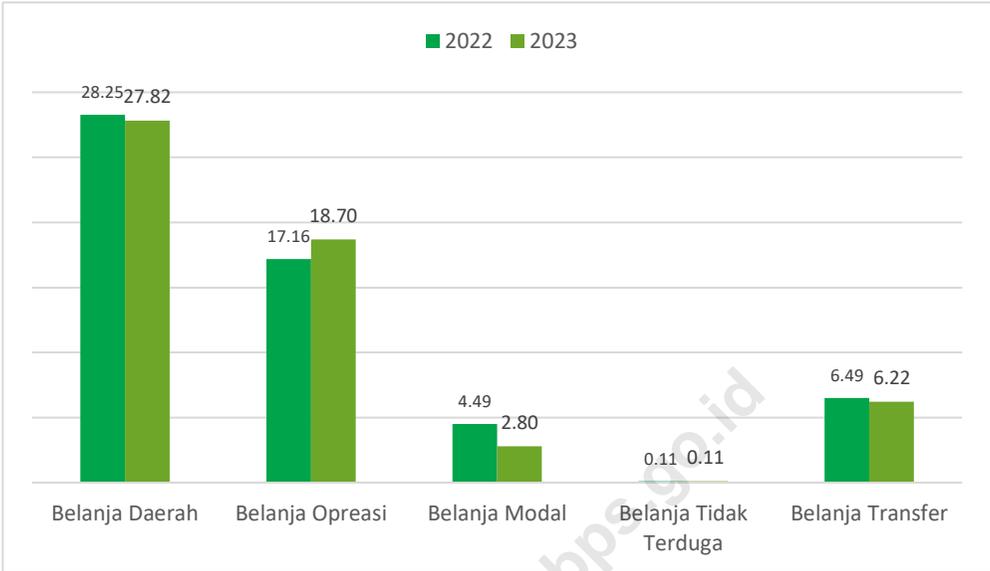
Tabel 4.9 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh Menurut Jenis Belanja Tahun 2022-2023 (Miliar Rupiah)

Jenis Belanja		2022	2023*
(1)		(2)	(3)
<b>A</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>28.592,98</b>	<b>27.815,45</b>
1	BELANJA OPERASI	18.295,51	18.705,38
1.1	Belanja Pegawai	10.262,75	10.703,15
1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.651,92	6.715,44
1.3	Belanja Bunga	10,56	8,76
1.4	Belanja Subsidi	4,28	15,51
1.5	Belanja Hibah	972,96	888,84
1.6	Belanja Bantuan Sosial	393,03	372,68
2	BELANJA MODAL	3.962,34	2.771,10
2.1	Belanja Modal	3.962,34	2.771,10
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	188,06	117,86
3.1	Belanja Tidak Terduga	188,06	117,86
4	BELANJA TRANSFER	6.147,07	6.222,11
4.1	Belanja Bagi Hasil	60,22	55,60
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	6.086,85	6.166,50
<b>B</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>41,13</b>	<b>64,91</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>28.634,11</b>	<b>27.880,36</b>

\*) APBD



Gambar 4.4 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh Tahun 2022-2023 (Triliun Rupiah)



\*) APBD

<https://aceh.bps.go.id>

Tabel 4.10 Kontribusi Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota  
Seluruh Provinsi Aceh Menurut Jenis Belanja Tahun 2022-2023 (Persen)

Jenis Belanja		2022	2023*
(1)		(2)	(3)
<b>A</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>99,86</b>	<b>99,77</b>
1	BELANJA OPERASI	63,89	67,09
1.1	Belanja Pegawai	35,84	38,39
1.2	Belanja Barang dan Jasa	23,23	24,09
1.3	Belanja Bunga	0,04	0,03
1.4	Belanja Subsidi	0,01	0,06
1.5	Belanja Hibah	3,40	3,19
1.6	Belanja Bantuan Sosial	1,37	1,34
2	BELANJA MODAL	13,84	9,94
2.1	Belanja Modal	13,84	9,94
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	0,66	0,42
3.1	Belanja Tidak Terduga	0,66	0,42
4	BELANJA TRANSFER	21,47	22,32
4.1	Belanja Bagi Hasil	21,47	21,32
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	21,26	21,12
<b>B</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0,14</b>	<b>0,23</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\*) APBD

Pada tabel 4.12 terlihat bahwa anggaran belanja daerah kabupaten/kota seluruh Provinsi Aceh mengalami peningkatan sebesar 1,20 persen dibandingkan realisasi belanja daerah kabupaten/kota seluruh Provinsi Aceh pada tahun 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya komponen belanja operasi dan belanja tidak terduga. Komponen belanja operasi mengalami peningkatan sebesar 6,59 persen sementara komponen belanja tidak terduga naik tajam mencapai 67,29 persen pada tahun 2023. Sedangkan untuk komponen belanja modal berkurang sebesar 11,72 persen dan alokasi anggaran komponen belanja transfer turun sebesar 5,27 persen dibanding realisasi belanja tahun 2022.

Tabel 4.11 Pertumbuhan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh Menurut Jenis Belanja Tahun 2022-2023 (Persen)

Jenis Belanja		2022	2023*
(1)		(2)	(3)
<b>A</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1,20</b>	<b>-1,55</b>
1	BELANJA OPERASI	6,59	8,98
1.1	Belanja Pegawai	6,79	11,38
1.2	Belanja Barang dan Jasa	5,47	6,47
1.3	Belanja Bunga	352,50	275,21
1.4	Belanja Subsidi	8,97	294,66
1.5	Belanja Hibah	13,88	4,04
1.6	Belanja Bantuan Sosial	1,64	-3,62
2	BELANJA MODAL	-11,72	-38,26
2.1	Belanja Modal	-11,72	-38,26
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	67,29	4,84
3.1	Belanja Tidak Terduga	67,29	4,84
4	BELANJA TRANSFER	-5,27	-4,11
4.1	Belanja Bagi Hasil	24,06	14,54
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	-5,49	-4,25
<b>B</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>-22,59</b>	<b>22,18</b>
JUMLAH		-1,12	-1,51

\*JAPBD

### 4.3 APBA DAN TOTAL APBD

Anggaran keuangan yang diterima oleh Provinsi Aceh selama dua tahun terakhir, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Aceh maupun Pemerintah Kabupaten/Kota harus dicermati untuk melihat pembangunan yang telah dicapai selama ini.

### 4.3.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan yang diterima oleh Provinsi Aceh selama ini cukup besar, yaitu 45,40 triliun rupiah pada tahun 2022. Dana ini dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Aceh sebesar 16,77 triliun rupiah dan sisanya sebesar 28,63 triliun rupiah tersebar ke kabupaten/kota.

Pada tahun 2023, pendapatan Provinsi Aceh ditargetkan menurun menjadi 39,07 triliun rupiah, jumlah ini sama dengan target belanja. Anggaran pendapatan Pemerintah Provinsi Aceh diperkirakan mencapai 11,19 triliun rupiah yang akan dibelanjakan seluruhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, demikian juga pendapatan daerah tingkat dua yang ditargetkan sebesar 27,88 triliun rupiah yang akan dibelanjakan seluruhnya.

Tabel 4.12 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh Tahun 2022-2023 (Miliar Rupiah)

Pemerintah Daerah	2022		2023*	
	Pendapatan	Belanja	Pendapatan	Belanja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Provinsi	16.766,15	16.766,15	11.193,86	11.193,86
Kabupaten/Kota	28.634,11	28.634,11	27.880,36	27.880,36
<b>Jumlah</b>	<b>45.400,26</b>	<b>45.400,26</b>	<b>39.074,22</b>	<b>39.074,22</b>
Surplus		0,00		0,00

\*) APBA/APBD

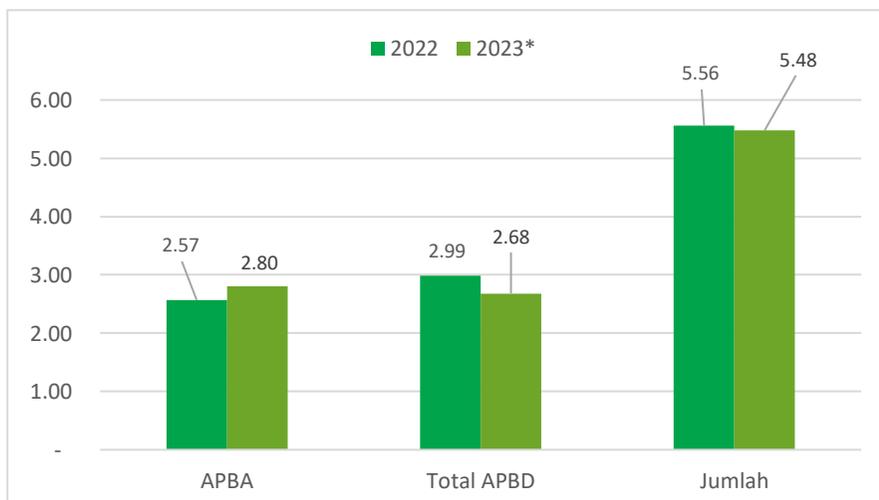
#### 4.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pos pemasukan pendapatan daerah tergolong kecil alirannya yang bersumber dari PAD, padahal ini merupakan salah satu bentuk kemandirian daerah. PAD yang diterima Aceh selama tahun 2022 berjumlah 5,56 triliun rupiah yang bersumber dari PAD Provinsi Aceh sebesar 2,57 triliun rupiah dan 2,99 triliun rupiah dari kabupaten/kota. Angka ini ditargetkan meningkat menjadi 5,48 triliun rupiah pada tahun 2023, dengan 2,80 triliun rupiah diantaranya ditargetkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh dan 2,68 triliun rupiah dianggarkan oleh Kabupaten/Kota.

Berdasarkan persentase PAD terhadap total pendapatan daerah, tingkat kemandirian keuangan suatu daerah dapat digolongkan menjadi rendah sekali (0-25%), rendah (>25-50%), sedang (>50-75%) dan tinggi (di atas 75%).

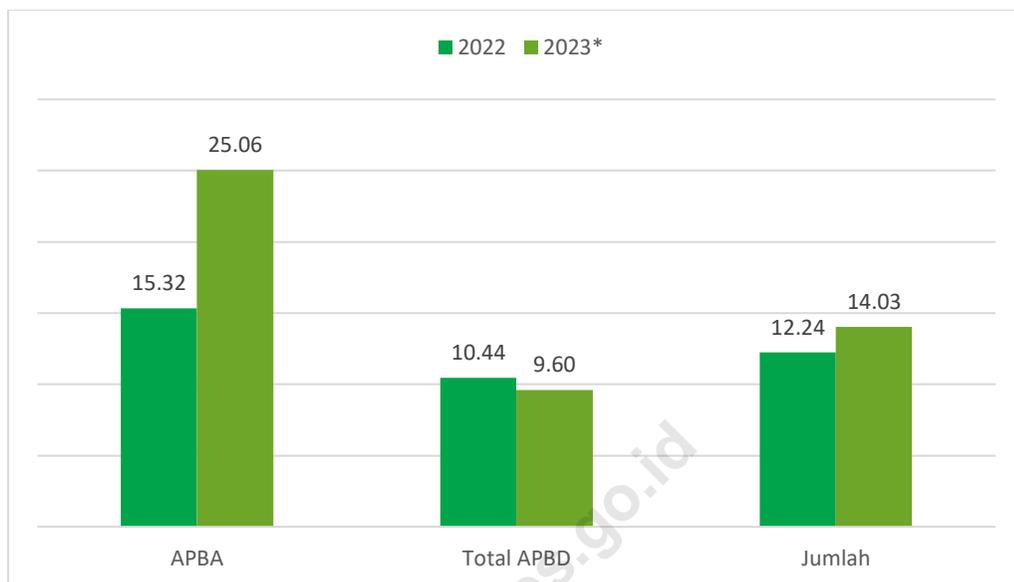
Pada Gambar 4.6 terlihat bahwa tingkat kemandirian Aceh tergolong rendah, yaitu hanya 25,06 persen selama tahun terakhir. Kemandirian Pemerintah Provinsi Aceh juga tergolong sangat rendah, hanya 12-15 persen selama tahun 2022-2023. Bahkan kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota lebih rendah dengan angka 10 persen dalam kurun waktu yang sama. Walaupun pertumbuhan PAD selama dua tahun terakhir ini masih mengalami peningkatan akibat naiknya total PAD pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota yang mencapai 7 persen.

Gambar 4.5 Realisasi PAD Pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh Tahun 2022-2023 (Triliun Rupiah)



\*) APBA/APBD

Gambar 4.6 Kontribusi Realisasi PAD Pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh Tahun 2022-2023 (Persen)



\*) APBA/APBD

#### 4.3.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer memegang peranan yang sangat penting dalam keuangan daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan kontribusinya yang lebih tinggi dibanding dana PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sebagian besar pendapatan transfer ini berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat. Dana ini tidak bersifat kekal karena hanya bersifat bantuan sementara sebelum daerah dapat mandiri dalam hal keuangan. Oleh karena itu, daerah seyogyanya tidak menggantungkan sumber keuangan utamanya dari dana perimbangan ini, melainkan mengatur strategi agar penerimaan asli daerahnya dapat lebih dioptimalkan.

Pada Gambar 4.8 terlihat bahwa pendapatan transfer yang diterima oleh Provinsi Aceh pada tahun 2022 berjumlah 35,43 triliun rupiah. Sebanyak 24,66 triliun rupiah diantaranya diterima oleh kabupaten/kota, sedangkan 10,77 triliun oleh Pemerintah Provinsi Aceh.

Mulai pada anggaran tahun 2023 mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada tahun 2023 Pendapatan Transfer dianggarkan turun sebesar 2,33 persen menjadi 31,46 triliun rupiah. Sebanyak 24,08 triliun rupiah diantaranya tersebar di seluruh kabupaten/kota, sedangkan 7,38 triliun rupiah diterima Pemerintah Provinsi Aceh.

Gambar 4.7 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh Tahun 2022-2023 (Triliun Rupiah)



\*) APBA/APBD

Kontribusi anggaran pendapatan transfer terhadap keuangan daerah di Aceh terbilang tinggi, yaitu mencapai 78-80 persen di tahun 2022-2023. Besarnya kontribusi dana ini mengindikasikan ketergantungan daerah terhadap alokasi dana dari Pemerintah Pusat. Apabila suatu saat pendapatan transfer ini dihentikan, maka akan merusak jalannya roda pemerintahan dan proses pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah di Aceh harus melakukan perencanaan yang lebih matang untuk kedepannya.

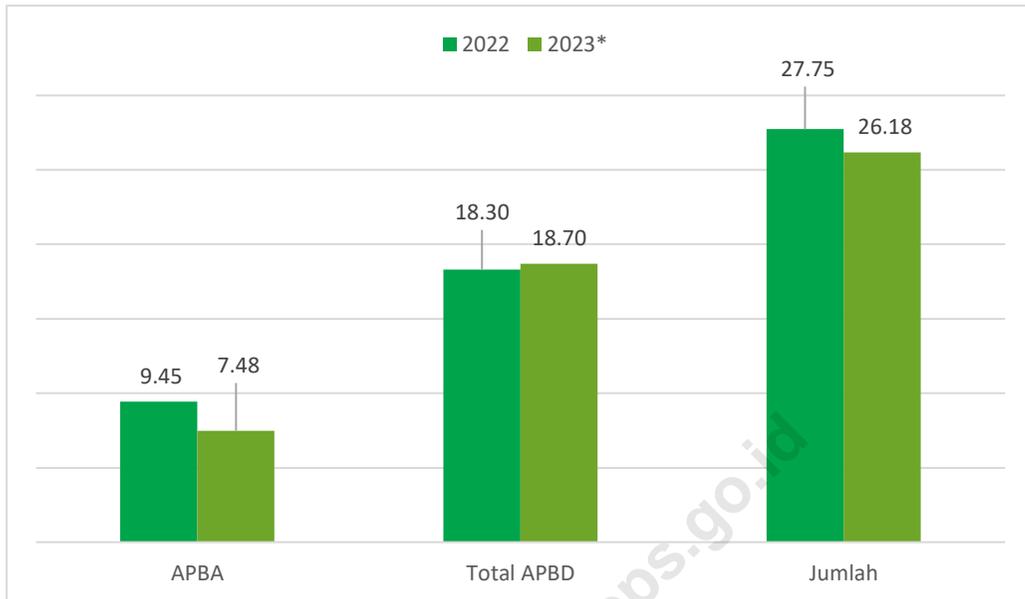
### **4.3.2 Belanja Daerah**

Belanja daerah Aceh harus dicermati untuk melihat apakah pengeluaran yang dilakukan sejalan dengan amanat pembangunan nasional dan berkontribusi positif terhadap perekonomian daerah. Ada tiga komponen yang memberikan kontribusi besar dari belanja daerah, yaitu (1) alokasi untuk belanja operasi, (2) belanja modal yang bersifat investasi, serta (3) belanja transfer.

#### **4.3.2.1 Belanja Operasi**

Realisasi Belanja Operasi di Aceh tahun 2022 mencapai 27,75 triliun dan dianggarkan turun 1,62 persen menjadi 26,18 triliun pada tahun 2023. Komponen yang memberikan kontribusi terbesar pada belanja operasi adalah Belanja Pegawai yaitu sebesar 35,35 persen atau senilai 13,18 triliun rupiah di tahun 2023. Belanja pegawai dialokasikan untuk membiayai kinerja aparatur pemerintahan sehingga roda pemerintahan dan strategi pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Peningkatan belanja pegawai ini harus disertai dengan peningkatan pelayanan publik dan dampak positif proses pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.

Gambar 4.8 Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh Tahun 2022-2023 (Triliun Rupiah)



\*) APBA/APBD

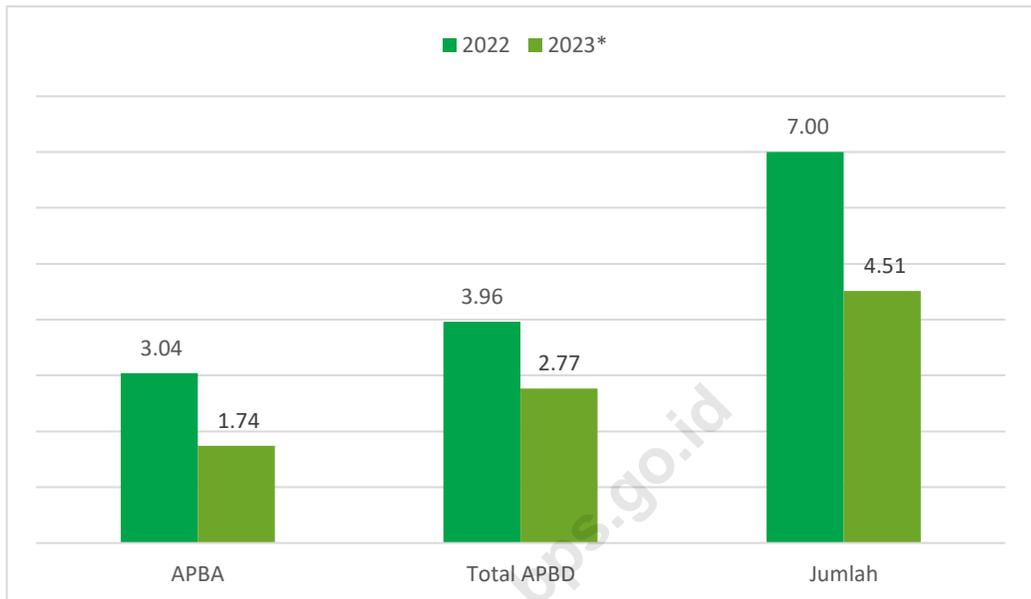
Sebagian besar Belanja Pegawai yaitu sebesar 10,70 triliun rupiah dinikmati oleh aparatur sipil kabupaten/kota, sedangkan 3,11 triliun rupiah sisanya terserap oleh aparatur sipil provinsi.

#### 4.3.2.2 Belanja Modal

Belanja modal layak untuk diperhatikan lebih cermat karena bersifat investasi yang akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di masa-masa mendatang. Semakin besar jumlah dan kontribusi belanja modal ini semakin baik untuk proses pembangunan.

Selama tahun 2023, belanja modal di Aceh tercatat sebesar 4,51 triliun rupiah. Sebagian besar diantaranya dibelanjakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu sebesar 2,77 triliun rupiah, sedangkan belanja Pemerintah Provinsi Aceh mencapai 1,74 triliun rupiah. Proporsi belanja modal Pemerintah Provinsi Aceh tersebut mencapai angka 15,51 persen, sedangkan kontribusi belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 9,94 persen.

Gambar 4.9 Realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh Tahun 2022-2023 (Triliun Rupiah)



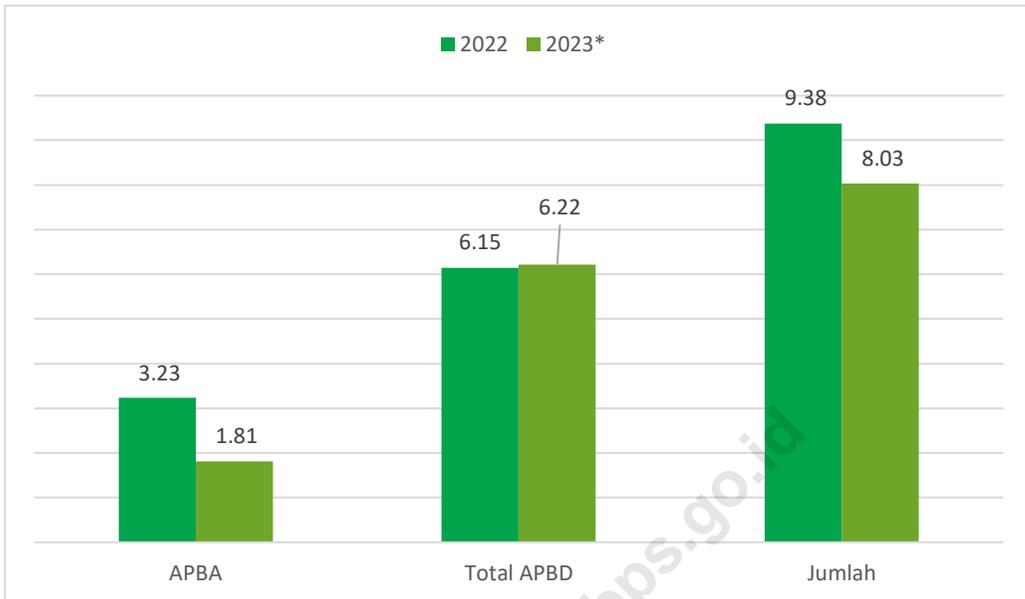
\*) APBA/APBD

#### 4.3.2.3 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan komponen yang memiliki kontribusi terbesar kedua terhadap total belanja Provinsi Aceh baik pada realisasi tahun 2022 maupun anggaran yang ditargetkan di tahun 2023. Nilai kontribusi belanja transfer ini pada tahun 2022 adalah sebesar 20,65 persen atau senilai 9,38 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun 2023, kontribusi belanja transfer dianggarkan sebesar 20,56 persen atau senilai 8,03 triliun rupiah.

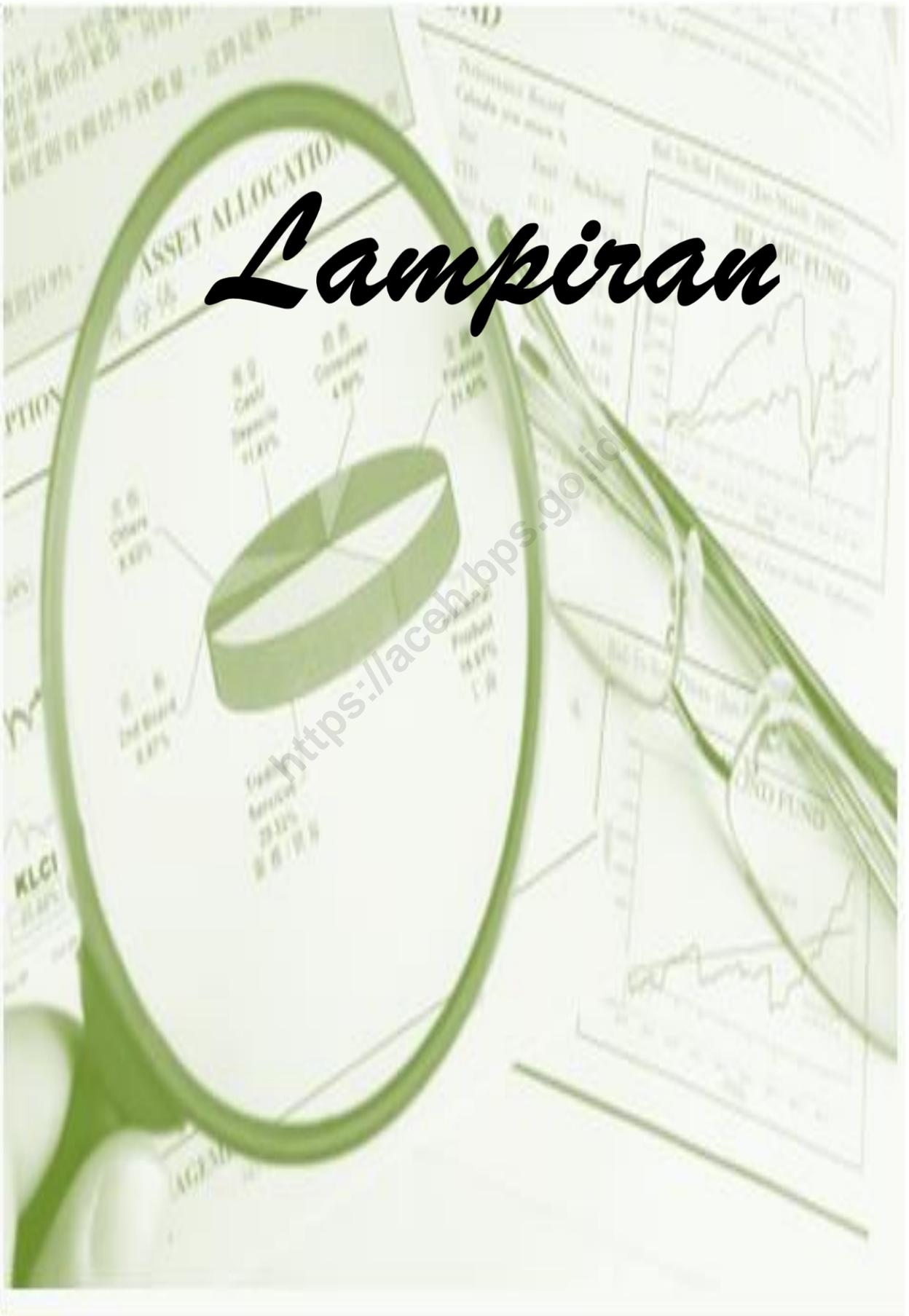
Komponen belanja transfer yang paling dominan berkontribusi terhadap total belanja Provinsi Aceh adalah belanja bantuan keuangan yaitu sebesar 19,83 persen pada realisasi tahun 2022 dan dianggarkan berkontribusi sebesar 18,21 persen pada tahun 2023.

Gambar 4.10 Realisasi Belanja Transfer Pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh Tahun 2022-2023 (Triliun Rupiah)



\*) APBA/APBD

# Lampiran



Jenis Belanja		2022	2023*
(1)		(2)	(3)
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH (1 +2 +3)</b>	<b>13.352,98</b>	<b>10.186,82</b>
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.568,19	2.805,48
1.1	Pajak Daerah	1.540,10	1.720,37
1.2	Retribusi Daerah	9,07	12,94
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	182,39	252,93
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	836,64	819,24
2	PENDAPATAN TRANSFER	10.773,39	7.377,78
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	10.773,39	7.377,78
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11,40	3,56
3.1	Pendapatan Hibah	11,40	3,56
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>3.413,17</b>	<b>1.007,04</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>16.766,15</b>	<b>11.193,86</b>
<b>A</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>16.170,65</b>	<b>11.093,86</b>
1	BELANJA OPERASI	9.449,54	7.476,81
1.1	Belanja Pegawai	3.043,95	3.110,20
1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.365,57	3.424,10
1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00
1.4	Belanja Subsidi	4,47	15,04
1.5	Belanja Hibah	893,22	682,17
1.6	Belanja Bantuan Sosial	142,34	245,29
2	BELANJA MODAL	3.042,32	1.736,33
2.1	Belanja Modal	3.042,32	1.736,33
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	448,85	67,44
3.1	Belanja Tidak Terduga	448,85	67,44
4	BELANJA TRANSFER	3.229,94	1.813,28
4.1	Belanja Bagi Hasil	733,19	862,50
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	2.496,75	950,78
<b>B</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>595,50</b>	<b>100,00</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>16.766,15</b>	<b>11.193,86</b>

\*APBA

Jenis Belanja		2022	2023*
(1)		(2)	(3)
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH (1 +2 +3)</b>	<b>27.814,04</b>	<b>27.206,88</b>
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.989,84	2.676,18
1.1	Pajak Daerah	531,45	546,72
1.2	Retribusi Daerah	314,41	267,69
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	116,57	113,20
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.027,41	1.748,58
2	PENDAPATAN TRANSFER	24.657,90	24.083,24
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	21.791,95	22.432,60
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	2.865,95	1.650,64
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	166,30	447,45
3.1	Pendapatan Hibah	17,53	32,68
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undadngan	148,77	414,78
<b>B</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>820,07</b>	<b>673,48</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>28.634,11</b>	<b>27.880,36</b>
<b>A</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>28.592,98</b>	<b>27.815,45</b>
1	BELANJA OPERASI	18.295,51	18.705,38
1.1	Belanja Pegawai	10.262,75	10.703,15
1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.651,92	6.715,44
1.3	Belanja Bunga	10,56	8,76
1.4	Belanja Subsidi	4,28	15,51
1.5	Belanja Hibah	972,96	888,84
1.6	Belanja Bantuan Sosial	393,03	372,68
2	BELANJA MODAL	3.962,34	2.771,10
2.1	Belanja Modal	3.962,34	2.771,10
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	188,06	117,86
3.1	Belanja Tidak Terduga	188,06	117,86
4	BELANJA TRANSFER	6.147,07	6.222,11
4.1	Belanja Bagi Hasil	60,22	55,60
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	6.086,85	6.166,50
<b>B</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>41,13</b>	<b>64,91</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>28.634,11</b>	<b>27.880,36</b>

\*APBD

Jenis Belanja		2022	2023*
(1)		(2)	(3)
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH (1 +2 +3)</b>	<b>79,64</b>	<b>91,00</b>
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	15,32	25,02
1.1	Pajak Daerah	9,19	15,37
1.2	Retribusi Daerah	0,05	0,12
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,09	2,26
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4,99	7,32
2	PENDAPATAN TRANSFER	64,26	65,91
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	64,26	65,91
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,07	0,03
3.1	Pendapatan Hibah	0,07	0,03
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undadngan	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>20,36</b>	<b>9,00</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>96,45</b>	<b>99,11</b>
1	BELANJA OPERASI	56,36	66,79
1.1	Belanja Pegawai	18,16	27,78
1.2	Belanja Barang dan Jasa	32,00	30,59
1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00
1.4	Belanja Subsidi	0,03	0,13
1.5	Belanja Hibah	5,33	6,09
1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,85	2,19
2	BELANJA MODAL	18,15	15,51
2.1	Belanja Modal	18,15	15,51
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2,68	0,60
3.1	Belanja Tidak Terduga	2,68	0,60
4	BELANJA TRANSFER	19,26	16,20
4.1	Belanja Bagi Hasil	4,37	7,71
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	14,89	8,49
<b>B</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>3,55</b>	<b>0,89</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\*APBA

Jenis Belanja		2022	2023*
(1)		(2)	(3)
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH (1 +2 +3)</b>	<b>97,14</b>	<b>97,58</b>
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	10,44	9,60
1.1	Pajak Daerah	1,86	1,96
1.2	Retribusi Daerah	1,10	0,96
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,41	0,41
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7,08	6,27
2	PENDAPATAN TRANSFER	86,11	86,38
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	76,10	80,46
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	10,01	5,92
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,58	1,61
3.1	Pendapatan Hibah	0,06	0,12
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undadngan	0,52	1,49
<b>B</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>2,86</b>	<b>2,42</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>99,86</b>	<b>99,77</b>
1	BELANJA OPERASI	63,89	67,09
1.1	Belanja Pegawai	35,84	38,39
1.2	Belanja Barang dan Jasa	23,23	24,09
1.3	Belanja Bunga	0,04	0,03
1.4	Belanja Subsidi	0,01	0,06
1.5	Belanja Hibah	3,40	3,19
1.6	Belanja Bantuan Sosial	1,37	1,34
2	BELANJA MODAL	13,84	9,94
2.1	Belanja Modal	13,84	9,94
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	0,66	0,42
3.1	Belanja Tidak Terduga	0,66	0,42
4	BELANJA TRANSFER	21,47	22,32
4.1	Belanja Bagi Hasil	21,47	21,32
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	21,26	21,12
<b>B</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0,14</b>	<b>0,23</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\*APBD

Jenis Belanja		2022	2023*
(1)		(2)	(3)
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH (1 +2 +3)</b>	<b>-4,27</b>	<b>-23,71</b>
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,49	9,24
1.1	Pajak Daerah	0,69	11,71
1.2	Retribusi Daerah	9,21	42,64
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19,65	38,68
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2,59	-2,08
2	PENDAPATAN TRANSFER	-5,75	-31,52
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-5,75	-31,52
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,59	-68,77
3.1	Pendapatan Hibah	16,13	-68,77
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undadngan	-100,00	0,00
<b>B</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>-14,03</b>	<b>-70,50</b>
JUMLAH		-6,43	-33,24
<b>A</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>18,18</b>	<b>-31,40</b>
1	BELANJA OPERASI	9,25	-20,88
1.1	Belanja Pegawai	15,69	2,18
1.2	Belanja Barang dan Jasa	4,67	-36,18
1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00
1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00
1.5	Belanja Hibah	17,75	-23,63
1.6	Belanja Bantuan Sosial	6,58	72,63
2	BELANJA MODAL	38,33	-42,93
2.1	Belanja Modal	38,33	-42,93
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	108.826,06	-84,98
3.1	Belanja Tidak Terduga	108.826,06	-84,98
4	BELANJA TRANSFER	13,95	-43,86
4.1	Belanja Bagi Hasil	2,51	17,64
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	17,81	-61,92
<b>B</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>97,69</b>	<b>-83,21</b>
JUMLAH		19,89	-33,24

\*APBA

Jenis Belanja		2022	2023*
(1)		(2)	(3)
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH (1 +2 +3)</b>	<b>-2,22</b>	<b>-2,18</b>
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	11,33	-10,49
1.1	Pajak Daerah	10,11	2,87
1.2	Retribusi Daerah	19,03	-14,86
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20,38	-2,89
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10,07	-13,75
2	PENDAPATAN TRANSFER	-1,52	-2,33
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-4,27	2,94
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25,96	-42,41
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-76,92	176,06
3.1	Pendapatan Hibah	-86,02	86,46
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undadngan	-75,00	178,80
<b>B</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>-33,86</b>	<b>-25,79</b>
JUMLAH		-3,54	-2,86
<b>A</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1,20</b>	<b>-1,55</b>
1	BELANJA OPERASI	6,59	8,98
1.1	Belanja Pegawai	6,79	11,38
1.2	Belanja Barang dan Jasa	5,47	6,47
1.3	Belanja Bunga	352,50	275,21
1.4	Belanja Subsidi	8,97	294,66
1.5	Belanja Hibah	13,88	4,04
1.6	Belanja Bantuan Sosial	1,64	-3,62
2	BELANJA MODAL	-11,72	-38,26
2.1	Belanja Modal	-11,72	-38,26
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	67,29	4,84
3.1	Belanja Tidak Terduga	67,29	4,84
4	BELANJA TRANSFER	-5,27	-4,11
4.1	Belanja Bagi Hasil	24,06	14,54
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	-5,49	-4,25
<b>B</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>-22,59</b>	<b>22,18</b>
JUMLAH		1,16	-1,51

\*APBD

Jenis Belanja		2022	2023*
(1)		(2)	(3)
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH (1 +2 +3)</b>	<b>41.167,02</b>	<b>37.393,70</b>
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.558,03	5.481,66
1.1	Pajak Daerah	2.071,54	2.267,09
1.2	Retribusi Daerah	323,48	280,63
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	298,95	366,13
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.864,05	2.567,82
2	PENDAPATAN TRANSFER	35.431,29	31.461,02
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	32.565,34	29.810,38
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	2.865,95	1.650,64
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	177,70	451,01
3.1	Pendapatan Hibah	17,53	32,68
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undadngan	148,77	414,78
<b>B</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>4.233,23</b>	<b>1.680,52</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>45.400,26</b>	<b>39.074,22</b>
<b>A</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>44.424,56</b>	<b>38.909,31</b>
1	BELANJA OPERASI	26.613,84	26.182,19
1.1	Belanja Pegawai	12.653,87	13.813,35
1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.672,63	10.139,54
1.3	Belanja Bunga	2,33	8,9576
1.4	Belanja Subsidi	8,40	30,55
1.5	Belanja Hibah	1.747,57	1.571,07
1.6	Belanja Bantuan Sosial	529,03	617,97
2	BELANJA MODAL	7.530,75	4.507,43
2.1	Belanja Modal	7.530,75	4.507,43
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	561,27	185,30
3.1	Belanja Tidak Terduga	561,27	185,30
4	BELANJA TRANSFER	9.718,70	8.035,39
4.1	Belanja Bagi Hasil	781,74	918,10
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	8.936,97	7.117,28
<b>B</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>648,63</b>	<b>164,91</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>45.400,26</b>	<b>39.074,22</b>

\*APBA/APBD

Jenis Belanja		2022	2023*
(1)		(2)	(3)
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH (1 +2 +3)</b>	<b>90,68</b>	<b>95,70</b>
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	12,24	14,03
1.1	Pajak Daerah	4,56	5,80
1.2	Retribusi Daerah	0,71	0,72
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,66	0,94
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6,31	6,57
2	PENDAPATAN TRANSFER	78,04	80,52
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	71,73	76,29
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	6,31	4,22
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,39	1,15
3.1	Pendapatan Hibah	0,04	0,08
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undadngan	0,33	1,06
<b>B</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>9,32</b>	<b>4,30</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>98,60</b>	<b>99,58</b>
1	BELANJA OPERASI	61,11	67,01
1.1	Belanja Pegawai	29,31	35,35
1.2	Belanja Barang dan Jasa	26,47	25,95
1.3	Belanja Bunga	0,02	0,02
1.4	Belanja Subsidi	0,02	0,08
1.5	Belanja Hibah	4,11	4,02
1.6	Belanja Bantuan Sosial	1,18	1,58
2	BELANJA MODAL	15,43	11,54
2.1	Belanja Modal	15,43	11,54
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1,40	0,47
3.1	Belanja Tidak Terduga	1,40	0,47
4	BELANJA TRANSFER	20,65	20,56
4.1	Belanja Bagi Hasil	1,75	2,35
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	18,91	18,21
<b>B</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>1,40</b>	<b>0,42</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\*APBA/APBD

Jenis Belanja		2022	2023*
(1)		(2)	(3)
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH (1 +2 +3)</b>	<b>-2,89</b>	<b>-9,17</b>
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7,06	-1,37
1.1	Pajak Daerah	2,95	9,44
1.2	Retribusi Daerah	18,74	-13,25
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19,93	22,47
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7,77	-10,34
2	PENDAPATAN TRANSFER	-2,85	-11,21
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-4,76	-8,46
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25,96	-42,41
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-75,72	153,81
3.1	Pendapatan Hibah	-86,02	86,46
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undadngan	-75,06	178,80
<b>B</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>-18,75</b>	<b>-60,30</b>
JUMLAH		-4,63	-13,93
<b>A</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>6,74</b>	<b>-12,41</b>
1	BELANJA OPERASI	7,48	-1,62
1.1	Belanja Pegawai	8,70	9,16
1.2	Belanja Barang dan Jasa	5,11	-13,13
1.3	Belanja Bunga	352,50	275,21
1.4	Belanja Subsidi	122,65	263,80
1.5	Belanja Hibah	15,70	-10,10
1.6	Belanja Bantuan Sosial	2,91	16,81
2	BELANJA MODAL	4,74	-40,15
2.1	Belanja Modal	4,74	-40,15
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	464,51	-66,99
3.1	Belanja Tidak Terduga	464,51	-66,99
4	BELANJA TRANSFER	0,58	-17,32
4.1	Belanja Bagi Hasil	3,88	17,44
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,28	-20,36
<b>B</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>79,66</b>	<b>-74,58</b>
JUMLAH		7,35	-13,31

\*APBA/APBD

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI ACEH**

Jln. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 50 Banda Aceh

Telp. (0651) 23005 Fax. (0651) 33632

Homepage : <http://aceh.bps.go.id>

Email : [bps1100@mailhost.bps.go.id](mailto:bps1100@mailhost.bps.go.id)

